

**REVIEW**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2015-2019**

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



**INTEGRITAS**



**PROFESIONAL**



**INOVATIF**



**PEDULI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang atas rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat dan Salam kepada junjungan tinggi Nabi Muhammad SAW., review terhadap Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2018 untuk masa transisi tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi lingkungan internal dan eksternal PKP2A IV LAN.

Renstra merupakan dokumen yang memuat perencanaan strategis untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dilakukan review tiap tahun dengan menyesuaikan pada kebijakan internal maupun eksternal. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan bagian dari perencanaan nasional pemerintah dan dalam penyusunan serta proses review, Renstra PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 mengacu pada Permen PPN/Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019.

Renstra PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 merupakan turunan dari Renstra LAN yang disusun dan direview untuk mengakomodir kebutuhan PKP2A IV LAN dan sebagai upaya melaksanakan amanat pembentukan organisasi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, agenda prioritas Nawacita dan isu strategis lainnya. Sesuai dengan mandatnya, PKP2A IV LAN berupaya pro-aktif dan partisipatif dalam mendukung dan mengimplementasikan Nawacita kedua yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta menjunjung tinggi azas demokrasi.

Review Renstra PKP2A IV LAN Tahun 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat memberikan masukan dan kritikan yang berifat konstruktif untuk peningkatan isi dan muatan Renstra ini menjadi lebih baik di masa akan datang.

Aceh Besar, 2018  
Kepala



Faizal Adriansyah

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>23</b>
2.1. Visi .....	23
2.2. Misi .....	25
2.3. Tujuan.....	25
2.4. Sasaran Strategis .....	26
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>27</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LAN .....	31
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PKP2A IV LAN .....	32
3.4. Kerangka Regulasi .....	35
3.5. Kerangka Kelembagaan .....	36
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Target Kinerja.....	38
4.2. Kerangka Pendanaan.....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2015- 2019 (berdasarkan dokumen RPJMN 2015-2019 Bappenas)..	47
LAMPIRAN II Matriks Kinerja dan Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2015- 2019 (berdasarkan DIPA Awal dan usulan Pagu Anggaran) .	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Ruang .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan .....	7
Tabel 1.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	8
Tabel 1.5 Model Inovasi berbasis IT.....	9
Tabel 1.6 Model Inovasi berbasis non-IT .....	10
Tabel 1.7 Model Inovasi berbasis Kreatifitas .....	10
Tabel 1.8 Peta Jabatan PKP2A IV LAN .....	12
Tabel 1.9 Realisasi Anggaran PKP2A IV LAN Tahun 2015-2017.....	17
Tabel 1.10 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019.. .....	18
Tabel 1.11 Produk Kajian PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019 .....	20
Tabel 3.1 Skor SAKIP LAN dan PKP2A IV LAN Tahun 2015-2016.....	33
Tabel 4.1 Target Kinerja PKP2A IV LAN tahun 2018 .....	39
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2015-2016.....	42
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2019.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PKP2A IV LAN.....	37
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Alokasi Anggaran RM dan PNBP Tahun 2015-2019 .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN) Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program, kegiatan, arah strategi dan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Prioritas Nasional dan kebijakan internal LAN.

Review Renstra PKP2A IV LAN merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk mengakomodir perubahan dan penyesuaian berbagai kebijakan teknis dan non-teknis baik dari internal maupun eksternal sebagai upaya menghadapi tantangan erintahan global. Dengan adanya review Renstra diharapkan rencana kinerja PKP2A IV LAN lebih akuntabel dan *reliable* serta mampu mewujudkan visi dan misi untuk periode 5 (lima) tahun.

Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 memasuki tahap ke-3 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) yang terus meningkat. Upaya tersebut memerlukan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Terkait dengan hal ini, pembangunan Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu aspek yang penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dimana paradigma *merit system* dengan seleksi terbuka yang kompetitif dalam undang-undang ini memberikan harapan bagi perbaikan kualitas ASN yang lebih kompetitif dengan kinerja yang lebih baik. Dengan paradigma tersebut kompetensi menjadi syarat penting dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Undang-Undang ini juga menggaris-bawahi bahwa "Pengembangan Kompetensi menjadi hak bagi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme di lingkungan birokrasi".

Melalui upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur sipil Negara diharapkan akan mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik dan berdampak positif dalam penyediaan pelayanan publik. Agenda Reformasi Birokrasi juga menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, dimana melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Refomasi Birokrasi, pemerintah telah mencetuskan komitmen untuk menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas kebijakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan ini antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan birokrasi yang

berkualitas. Kebijakan tentang reformasi birokrasi ini mengikat ke semua instansi baik di Pusat maupun di Daerah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang didirikan pada tahun 1957 memiliki peranan penting dalam peningkatan, pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN menjadi lebih berkualitas, profesional dan mampu mewujudkan skema pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel melalui Program Pendidikan dan Pelatihan ASN yang diselenggarakan setiap tahun di LAN maupun di Satuan Kerja LAN yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia, LAN mempunyai tugas dan fungsi yang strategis khususnya dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara.

PKP2A IV LAN yang merupakan Satuan Kerja di lingkungan LAN untuk wilayah Aceh dan Sumatera memiliki fungsi untuk mengawal dan mensupervisi keberlangsungan implementasi pengembangan Sistem Administrasi Negara di daerah secara efektif, efisien dan berkesinambungan dengan senantiasa mengikuti perkembangan lingkungan strategik pemerintahan dan kebijakan pembangunan untuk masa lima tahun (2015-2019) khususnya Provinsi Aceh dan beberapa provinsi lainnya di Sumatera yang meliputi beberapa isu prioritas diantaranya :

- 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
- 2) Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan;
- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat (degradasi angka kemiskinan dan pengangguran);
- 4) Infrastruktur dan sanitasi;
- 5) Sumber daya alam terbarukan;
- 6) Kebencanaan (mitigasi dan rekonsiliasi);
- 7) Resolusi konflik dan reintegrasi secara berkesinambungan.



Dari beberapa isu prioritas diatas, PKP2A IV LAN dapat menerapkan metode pembelajaran yang sistematis dan sinergis melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur, eksplorasi dan elaborasi hasil pengkajian kebijakan yang akan menstimulasikan berbagai rekomendasi kebijakan, dan mengembangkan model inovasi administrasi negara berbasis kinerja. Disamping itu, untuk menjawab berbagai tantangan global yang salah satunya menuntut pengembangan dan sinergitas IT dalam tatanan birokrasi pemerintahan, PKP2A IV LAN melalui program yang diamanatkan oleh LAN telah ikut serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif untuk meningkatkan skema pelayanan publik sektor pemerintahan melalui Laboratorium Inovasi di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Mentawai.

Hal tersebut diatas merupakan beberapa pertimbangan diperlukannya review tahunan terhadap Renstra PKP2A IV LAN, dimana berbagai kebijakan strategis kementerian/lembaga pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 hanya sebagai *basic planning*, bersifat stratejik dan indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan strategis internal dan eksternal lainnya yang lebih prioritas. Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan PKP2A IV LAN dinilai masih memerlukan perubahan dan penyesuaian secara bertahap dengan mengikuti perubahan IKU LAN supaya lebih konsisten, komprehensif dan terukur dengan baik serta dapat dirasakan manfaatnya baik oleh LAN, PKP2A IV LAN maupun instansi pemerintahan terkait dan tidak hanya berorientasi pada *output* tapi juga *outcome*.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **A. Potensi**

#### **A.1 Dukungan Kebijakan**

Untuk mewujudkan peran strategis dalam penyelenggaraan kajian dan inovasi di bidang administrasi Negara, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta pelaksanaan pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditelaah ditetapkan oleh Kepala LAN dan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Kepala LAN nomor 14 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) LAN, PKP2A IV LAN menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- 1) Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
- 3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat;
- 4) Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi Negara;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- 6) Penyelenggaraan administrasi pembinaan diklat, widyaiswara dan analisis kebijakan;
- 7) Pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya;
- 8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungannya;
- 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala.

Dukungan berbagai regulasi berupa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) nomor 5 tahun 2014 dan Perpres nomor 57 tahun 2013 tentang LAN telah memperkuat eksistensi PKP2A IV LAN dalam menyelenggarakan manajemen ASN melalui pendidikan dan pelatihan aparatur dengan kurikulum pembelajaran yang berbasis peningkatan kompetensi dan dapat diaktualisasi dalam pencapaian kinerja di satuan kerja masing-masing. UU ASN mengamanatkan kekhususan LAN selaku instansi pemerintah untuk melakukan pengkajian administrasi Negara yang selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi bagi penyelenggaraan pemerintah (UU ASN, pasal 25, pasal 43-46) dan sebagai pendorong berkembangnya inovasi di bidang administrasi negara.

Sebagai salah satu turunan dari UU ASN, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal

219 menjelaskan juga peran LAN atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN. Untuk menjalankan berbagai mandat tersebut, LAN beserta unit kerjanya telah menginisiasi berbagai konsep/desain pengembangan kompetensi, penyempurnaan implementasi kebijakan-kebijakan yang masih relevan dan pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, pelatihan dan dasar serta pelatihan teknis dan fungsional lainnya.

## A.2 Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan handal merupakan faktor sentral dan strategis dalam pemerintahan yang berguna sebagai penggerak sistem administrasi teknis dan non-teknis supaya terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara kuantitas jumlah aparatur sipil Negara pada PKP2A IV LAN per 30 Juni 2018 sebanyak 61 orang yang terdiri dari 44 PNS dan 17 CPNS, dengan komposisi sebagai berikut :

### 1) Berdasarkan Tingkat Golongan dan Ruang

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Ruang

NO	GOLONGAN	GOLONGAN DAN RUANG	JUMLAH	%
1.	Golongan IV (5 Orang)	Pembina Utama Madya, IV/d	1	1,64
		Pembina Utama Muda, IV/c	4	6,56
		Pembina, IV/a	3	4,92
2.	Golongan III (51 Orang)	Penata, III/c	7	11,48
		Penata Muda Tk. I, III/b	17	27,87
		Penata Muda, III/a	27	44,26
3.	Golongan II (2 Orang)	Pengatur Tk. I, II/d	1	1,64
		Pengatur, II/c	1	1,64
Jumlah			61	100,00

## 2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Strata III (S-III)	1	1,64
2.	Strata II (S-II)	14	22,95
3.	Strata I (S-I)	11	18,03
4.	Diploma III (D-III)	35	57,38
Jumlah		61	100,00

## 3) Berdasarkan Tingkat Jabatan

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1.	Struktural	6	9,84
2.	JFT (Peneliti)	3	6,56
3.	JFT (Widyaiswara)	6	9,84
4.	JFT (Perencana)	1	1,64
5.	JFU	45	72,13
Jumlah		61	100,00

Dilihat dari ketersediaan sumber daya aparatur (kuantitas maupun kualitas), PKP2A IV LAN telah memiliki komposisi pegawai yang proporsional, dan dapat dikategorikan sebagai salah satu kekuatan internal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai melalui program diklat gelar dan non-gelar, klasikal maupun non-klasikal disamping pengembangan kompetensi di bidang penjenjangan maupun bidang teknis lainnya tetap menjadi salah satu program regular yang dilaksanakan tiap tahun anggaran. Salah satunya kewajiban mendapatkan minimal 20 Jam Pembelajaran (JP) per tahun bagi setiap pegawai melalui kegiatan diklat gelar/non-gelar, bimbingan teknis dan berbagai kegiatan klasikal maupun non-klasikal terkait.

Berkenaan dengan pengembangan kompetensi melalui Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), hingga saat ini telah menghasilkan 5 orang Fungsional Peneliti (1 orang telah menduduki jabatan struktural), 6 orang Fungsional Widyaiswara (1 orang merangkap struktural) dan 2 orang bersertifikat Fungsional Perencana (1 orang telah menduduki jabatan struktural). Begitu juga halnya pengembangan kompetensi teknis yang telah menghasilkan 2 orang bersertifikat Bendahara dan 8 orang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.

### A.3 Dukungan Sarana dan Prasarana

Bangunan Kantor PKP2A IV LAN yang menempati areal seluas 7.699 m<sup>2</sup> di Jl. Dr. Mr. Teuku Muhammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2014 telah memiliki berbagai kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan kajian kebijakan dan inovasi administrasi Negara serta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara di tingkat daerah maupun nasional.

Meskipun demikian, penambahan sarana dan fasilitas prasarana penunjang lainnya serta pemeliharaan rutin masih sangat diperlukan baik yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan peningkatan tersebut masih dilaksanakan hingga sekarang.

Tabel 1.4  
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	NAMA GEDUNG	FASILITAS/KAPASITAS	PROGRESS
1.	Gedung Administrasi	Ruangan Kerja dan Rapat	Pemeliharaan rutin
2.	Gedung Diklat	3 kamar VIP, 39 kamar Standar, 4 ruang Belajar, 1 ruang Mini Theater	Peningkatan sarana (meubelair)
3.	Auditorium	Kapasitas ± 400 orang	Peningkatan sarana (meubelair dan IT)
4.	Musholla	Kapasitas ± 500 orang	Pemeliharaan rutin
5.	Gedung Utility		

Selain dukungan sarana dan prasarana gedung, PKP2A IV LAN juga telah melakukan beberapa pengembangan model inovasi administrasi negara berbasis IT, non-IT dan kreativitas yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan mempercepat pencapaian *output* maupun *outcome* dari suatu kegiatan secara relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan akurat (*accurate*). Hal ini merupakan salah satu komitmen PKP2A IV LAN untuk mengintegrasikan konsep perkantoran “cyber future” dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli.

### 1) Model Inovasi berbasis IT (*online access*)

Tabel 1.5  
Model Inovasi berbasis IT

NO	MODEL INOVASI	DESKRIPSI	PROGRESS
1.	Informasi Cyber Future (ICF)	Layanan informasi internal dan eksternal yang terdiri dari <i>mailing list</i> , <i>facebook</i> Humas LAN Aceh, website PKP2A IV LAN, <i>mailing-list</i> KBK, dan <i>twitter</i> PKP2A IV LAN	Pemutakhiran secara berkala
2.	SiMona	Sistem informasi untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan	Belum sempurna proses pemutakhiran aplikasi di server
3.	Training Network on Sumatera	Forum koordinasi untuk membangun jejaring/mitra antara lembaga/badan diklat se-Sumatera	Dalam proses peninjauan ulang
4.	E-budgeting	Program penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis IT	Stagnan, perlu adanya review lebih lanjut
5.	E-Jurnal +	Pengelolaan dan penerbitan artikel via Web	

## 2) Model Inovasi berbasis non-IT (*offline access*)

Tabel 1.6  
Model Inovasi berbasis non-IT

NO	MODEL INOVASI	DESKRIPSI	PROGRESS
1.	Handbook Penyelenggaraan Diklat	Petunjuk manual memuat informasi penyelenggaraan diklat yang dikemas secara ringkas, praktis dan mudah dipahami	
2.	Smax Services Kediklatan	Bentuk layanan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan diklat yang transparan dan akuntabel serta bermanfaat khususnya bagi peserta diklat dalam mengakses berbagai informasi yang relevan selama kelangsungan diklat	Peningkatan fasilitas pelayanan diklat aparatur

## 3) Model Inovasi berbasis Kreatifitas

Tabel 1.7  
Model Inovasi berbasis Kreatifitas

NO	MODEL INOVASI	DESKRIPSI	PROGRESS
1.	English day	Wadah berbagi ilmu intra organisasi khususnya bahasa Inggris	Belum terorganisir dengan baik
2.	Sharing Knowledge Forum	Forum diskusi dan berbagi ilmu pengetahuan terkait pengembangan sistem Administrasi negara, bersifat internal dan eksternal dengan melibatkan para stakeholders	Berkelanjutan
3.	Go Green and Clean	Wadah kebersamaan yang diwujudkan melalui komitmen bersama untuk menjaga kebersihan kantor secara berkelanjutan	Berkelanjutan
4.	Forum “Duek Pakat”	Merupakan forum diskusi untuk mengeksplorasi perkembangan administrasi ketatanegaraan, isu-isu aktual dan strategis lintas sektor	Belum terorganisir dengan baik
5.	Membangun Jembatan Hati	Meningkatkan hubungan silaturahmi sesama pegawai dan tenaga outsourcing	Berkelanjutan

## B. Kelemahan

### B.1 Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN nomor 14 tahun 2013 tentang SOTK LAN, PKP2A IV LAN yang merupakan bagian integral dari LAN memiliki wilayah kerja yang sangat luas mencakup Provinsi Aceh dan beberapa provinsi lainnya di Kepulauan Sumatera. Keberadaan sumber daya manusia aparatur pada PKP2A IV LAN hingga tahun 2018 masih dalam tingkat memadai (*middle level*) apabila ditinjau dari segi kemampuan, keterampilan, keahlian dan profesionalitas. Namun jika melihat proyeksi peningkatan beban kerja dengan cakupan wilayah kerja yang begitu besar tentunya masih membutuhkan peningkatan kompetensi yang lebih spesifik sesuai dengan formasinya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsi, diantaranya :

1. Rasio yang dimiliki terhadap kualitas sumber daya aparatur masih diperlukan peningkatan bila dibandingkan dengan tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja yang luas dan butuh pelayanan maksimal.
2. Sumber daya aparatur yang menempati formasi sebagai pelaksana belum memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
3. Keberadaan sumber daya manusia aparatur belum seutuhnya mencerminkan faktor utama dan penentu yang menjadi subyek pelaku perubahan (*agent of change*) dan belum sepenuhnya turut serta dalam rangkaian proses perubahan.

Berdasarkan data yang diupdate per 30 Juni 2018, PKP2A IV LAN yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II dan membawahi 3 Bidang/Bagian yaitu Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN), Bidang Diklat Aparatur dan Bagian Administrasi yang terdiri dari 3 Sub bagian yaitu Sub bagian Keuangan, Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Program, dan Sub bagian Umum dan SDM, dapat dipetakan kebutuhan peningkatan kompetensi yang lebih spesifik melalui jalur pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya aparatur internal sesuai dengan analisa jabatan masing-masing dan kebutuhan bagi pengembangan secara menyeluruh.



Tabel 1.8  
Peta Jabatan PKP2A IV LAN

NO	NAMA BIDANG/BAGIAN /SUB BAGIAN	NAMA JABATAN	B (BEIZETTING)	K (KEBUTUHAN)	G (GRADE)
1.	<b>BIDANG KKI</b>	a. Pengelola Kajian b. Pengelola Data dan Informasi c. Pengadministrasian Program dan Tata Operasional Penelitian	4 1	0 1	6 6 5
2.	<b>BIDANG DIKLAT APARATUR</b>	a. Pengelola Pembelajaran Diklat b. Pengelola Data Kepesertaan dan Alumni c. Pengelola Monitoring dan Evaluasi d. Pengelola Penyelenggaraan Diklat e. Pengelola Administrasi Pembinaan Diklat f. Analisis Program Diklat g. Analisis Pengembangan Program Akademis h. Pengadministrasian Umum Pelatihan	2 2 1 2 2	0 0 1 0 0	6 6 6 6 6 7 7 5
3.	<b>BAGIAN ADMINISTRASI</b> a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Program  b. Sub bagian Keuangan	1) Pengelola Bahan Perencanaan 2) Pengelola Bahan Pemantauan 3) Pengadministrasian Perencanaan dan Program  1) Bendahara Pengeluaran 2) Bendahara Penerimaan 3) Pengelola Belanja Pegawai 4) Pengelola Verifikasi dan Akuntansi	1 1 0	1 1 0	6 6 5  7 7 6 6

NO	NAMA BIDANG/BAGIAN /SUB BAGIAN	NAMA JABATAN	B (BEIZETTING)	K (KEBUTUHAN)	G (GRADE)
	<b>c. Sub bagian Umum dan SDM</b>	5) Pengelola Verifikasi Keuangan	1	0	6
		6) Perencanaan Kas	0	1	
		7) Pengadministrasi Keuangan	0	0	5
		1) Pemroses Administrasi Kepegawaian	2	0	6
		2) Pemroses Barjas	1	1	6
		3) Pengelola BMN	2	0	6
		4) Pengelola Sarana Pendukung Diklat	2	0	6
		5) Pengelola Sistem Informasi	1	0	6
		6) Pengelola Hubungan Masyarakat	1	1	6
		7) Teknisi Kerumah-tangga	0	2	6
		8) Pengelola Keamanan dan Kebersihan	0	2	6
		9) Pengelola Administrasi Perjalanan	0	1	6
		10) Pemroses Produk Hukum	0	1	6
		11) Pengelola Sistem Informasi Barjas	1	0	6
	12) Pengadministrasi Keperpustakaan	0	1	6	
	13) Pengadministrasi Umum	0	0	5	
<b>4</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>	a. Peneliti Madya	<b>3</b>	1	11
	b. Peneliti Muda	2		9	
	c. Peneliti Pertama	6		8	
	d. Analis Kebijakan Madya		1	11	
	e. Analis Kebijakan Muda		1	9	
	f. Analis Kebijakan Pertama		7	8	
	g. Perencana Madya		1	11	
	h. Perencana Muda		1	9	
	i. Perencana Pertama	<b>1</b>	0	8	
	j. Pustakawan Madya		1	11	
	k. Pustakawan Muda		1	9	
	l. Arsiparis Madya		1	11	
	m. Arsiparis Muda		1	9	

NO	NAMA BIDANG/BAGIAN /SUB BAGIAN	NAMA JABATAN	B (BEIZETTING)	K (KEBUTUHAN)	G (GRADE)
		n. Arsiparis Pertama		1	8
		o. Widyaiswara Utama		1	13
		p. Widyaiswara Madya	4	1	11
		q. Widyaiswara Muda	1	1	9
		r. Widyaiswara Pertama	1	3	8
		s. Analis Kepegawaian Madya		4	11
		t. Analis Kepegawaian Muda		1	9
		u. Analis Kepegawaian Pertama		1	8
		v. Pranata Humas Madya		1	11
		w. Pranata Humas Muda		1	9
		x. Pranata Humas Pertama		1	8
		y. Pranata Humas Penyelia		1	8
		z. Pranata Humas Mahir		1	7
		aa. Pranata Humas Terampil		2	6
		bb. Pengelola Pengadaan Barjas Muda		1	8
		cc. Dokter Pertama		1	8

## B.2 Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Berdasarkan tabel 1.8 diatas, apabila dilihat dari aspek kelembagaan dapat diuraikan beberapa permasalahan ataupun kendala yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Diperlukan penyempurnaan dalam pemetaan kebutuhan pegawai terhadap tantangan dan proyeksi beban kerja.
2. Belum terwujudnya integrasi keterlibatan pegawai lintas bidang/bagian dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadinya *overlapping* beban kerja dan kurangnya *knowledge-sharing*.
3. Belum terbangunnya hubungan kerja dalam suatu jejaring kerja yang lebih spesifik dengan melibatkan berbagai unsur lembaga seperti lintas sektoral secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dilihat dari aspek ketatalaksanaan atau manajemen, terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Skema usulan kegiatan berupa perencanaan belum sepenuhnya terakomodir dengan baik dan sesuai kebutuhan, sehingga masih terdapatnya penyesuaian dan perbaikan terhadap substansi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi belum optimal, hal ini dapat dilihat dari Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang masih dalam proses *review* dan perlu disesuaikan terhadap prosedur pelaksanaan yang berlaku.
3. Hubungan kerja antara PKP2A IV LAN dengan Satker LAN lainnya belum berjalan secara sinergis dan adaptif, hal ini dilihat dari berbagai terobosan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh beberapa Satker LAN belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik di lingkungan PKP2A IV LAN.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam pembagian peran antara PKP2A IV LAN selaku Pembina Diklat dengan lembaga-lembaga diklat di daerah.
5. Masih minimnya antusias ASN untuk mengikuti kegiatan diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh PKP2A IV LAN.
6. Perlunya rasionalisasi terhadap proses pembelajaran dalam kegiatan diklat, hal ini terlihat dari sisa anggaran honorarium pengajar (dari dalam satker maupun yang didatangkan dari luar satker) belum terealisasi secara maksimal tiap tahunnya, dan diperlukan pergeseran ke jenis belanja lain pada akhir pelaksanaan kegiatan/tahun anggaran.
7. Pemanfaatan hasil kajian kebijakan di bidang Ilmu Administrasi Negara belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap tatanan birokrasi pelayanan publik di daerah, hal ini dapat dilihat dari kurangnya *feedback* yang berkelanjutan dari penerima manfaat (*stakeholders* terkait) pasca penyerahan buku Kajian.
8. Masih kurangnya koordinasi Peneliti pada PKP2A IV LAN dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di daerah baik yang ada di pemerintahan maupun swasta sehingga hasil penelitian yang diusulkan

maupun yang telah *publish* belum sepenuhnya mengakomodir isu-isu strategis daerah maupun kebijakan substantif lainnya, dan hal ini lambat laun dapat melemahkan eksistensi kelitbang PKP2A IV LAN.

### **B.3 Aspek Sarana dan Prasarana**

Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, keberadaan gedung PKP2A IV LAN sebagai salah satu tempat yang representatif untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur dan berbagai program pengkajian, secara fisik telah memadai, namun seiring dengan meningkatnya intensitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dan perkembangan sistem administrasi negara ke arah yang lebih inovatif menuntut peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai disamping kebutuhan sarana dan prasarana lainnya, diantaranya :

1. Masih minimnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang dialokasikan, hal ini terlihat dari kecilnya persentase biaya pemeliharaan bangunan/gedung (mengikuti standar pemeliharaan Bangunan dan Gedung Negara) dibandingkan dengan luasan gedung/bangunan, usia pemakaian dan kerusakan teknis lainnya.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur seperti gedung olahraga dan perlengkapannya, laboratorium bahasa dan beberapa utilitas terkait pengembangan kompetensi ASN.
3. Ketersediaan sarana IT untuk mendukung sistem informasi dan manajemen yang berkenaan dengan *database* dan pengembangan produk-produk inovasi administrasi Negara belum maksimal.
4. Terbatasnya ketersediaan kendaraan operasional, dimana jumlah yang ada hingga sekarang sebanyak 5 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua yang merupakan hasil hibah langsung Pemerintah Aceh (1 unit mobil) dan proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun 2011.

#### B.4 Aspek Anggaran

Sistem pengalokasian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni baik di LAN maupun Satker LAN masih bersifat baseline, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap usulan penambahan anggaran dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi Bidang KKIAN, Bidang Diklat Aparatur, dan Bagian Administrasi. Walaupun dari tahun 2015 hingga sekarang PKP2A IV LAN telah ada penambahan dana yang bersumber dari kegiatan PNBP baik dari penyelenggaraan Diklat Aparatur maupun penyewaan Sarana dan Prasarana, namun penggunaan dana PNBP untuk menunjang pemenuhan sarana dan prasarana serta biaya operasional kantor lainnya sangatlah terbatas dan opsional dikarenakan adanya regulasi khusus dari Kementerian Keuangan dan LAN terkait pemanfaatan dana PNBP hanya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan diklat dan hanya dapat dapat direlokasi pasca pelaksanaan kegiatan.

Begitu juga halnya dengan pemanfaatan sisa anggaran melalui swakelola maupun penyedia untuk menunjang kebutuhan sarana yang diusulkan pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) kerap kali tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan hal ini berdampak pada tidak maksimalnya tingkat realisasi anggaran.

Tabel 1.9  
Realisasi Anggaran PKP2A IV LAN Tahun 2015-2017

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN		
		2015	2016	2017
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	95.91%	99.02%	99.08%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	99.90%	99.85%	-
3	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	86.36%	95.41%	94.39%
	Total	92.86%	97.39%	97.05%

Disamping itu, efisiensi anggaran atas kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun anggaran berjalan berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja yang telah ditandatangani oleh unit Eselon II (JPT Pratama), Eselon III

(Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) di lingkungan LAN dan Satker LAN pada awal tahun anggaran. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi kebijakan strategis dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

## C. Peluang dan Tantangan

### C.1 Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dan disinergikan oleh PKP2A IV LAN sebagai lembaga vertikal non-departemen dalam peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara, pengembangan kebijakan dan inovasi administrasi Negara, dan pelaksanaan tugas terkait lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Eksistensi PKP2A IV LAN sejauh ini telah menjadi salah satu instansi pemerintahan yang menjadi rujukan dalam pembinaan ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan lembaga-lembaga diklat di Provinsi Aceh dan beberapa provinsi lainnya di Kepulauan Sumatera. Hal ini dapat disinergikan khususnya dengan kedudukan Provinsi Aceh sebagai salah satu Daerah Otonomi Khusus, dimana dapat lebih memaksimalkan regulasi dan potensi yang ada didaerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di satu sisi apabila peluang besar itu tidak diikuti dengan ketersediaan kompetensi dari sumber daya aparatur yang memadai maka sistem tatakelola pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 1.10  
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PKP2A IV LAN  
Tahun 2015-2019

TAHUN	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2015	<p><b>Kepemimpinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklatpim Tk. II Angkatan XLI</li> <li>2. Diklatpim Tk. III Angkatan I</li> <li>3. Diklatpim Tk. IV Angkatan I</li> </ol> <p><b>Prajabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Prajabatan Gol. III (2 Angkatan)</li> <li>2. Diklat Prajabatan Gol. I dan II Angkatan I</li> </ol> <p><b>Teknis dan Fungsional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan TOF Diklat Prajabatan</li> </ol>

TAHUN	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2016	<p><b>Kepemimpinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklatpim Tk. II Angkatan XLII Kelas E</li> <li>2. Diklatpim Tk. III Angkatan II</li> <li>3. Diklatpim Tk. IV Angkatan II (2 Kelas)</li> </ol> <p><b>Prajabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Prajabatan Gol. III Angkatan II (7 Kelas)</li> <li>2. Diklat Prajabatan Honorer K1</li> </ol> <p><b>Teknis dan Fungsional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Pembinaan Widyaiswara</li> <li>2. Diklat TOC Angkatan I</li> </ol>
2017	<p><b>Kepemimpinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklatpim Tk. II</li> <li>2. Diklatpim Tk. III</li> <li>3. Diklatpim Tk. IV</li> </ol> <p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Revolusi Mental (4 Angkatan)</li> <li>2. Diklat Reforms Leader Academy (RLA)</li> </ol> <p><b>Teknis dan Fungsional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS</li> <li>2. Pelatihan TOT Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim</li> </ol>
2018	<p><b>Kepemimpinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklatpim Tk. II</li> <li>2. Diklatpim Tk. III</li> <li>4. Diklatpim Tk. IV</li> </ol> <p><b>Prajabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Dasar CPNS (2 Kelas)</li> </ol> <p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik (5 Angkatan)</li> <li>2. Diklat Reforms Leader Academy (RLA)</li> </ol> <p><b>Teknis dan Fungsional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan TOT Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim</li> <li>2. Pelatihan Calon Widyaiswara dengan Seleksi</li> </ol>
2019 (Pagu Anggaran)	<p><b>Kepemimpinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklatpim Tk. II</li> <li>2. Diklatpim Tk. III</li> <li>3. Diklatpim Tk. IV</li> </ol> <p><b>Prajabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Dasar CPNS</li> </ol> <p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Pelayanan Publik di Era Digital (4 Kelas)</li> </ol> <p><b>Teknis dan Fungsional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan MOT Berbasis E-learning (2 Kelas)</li> <li>2. Pelatihan TOC Berbasis E-learning (2 Kelas)</li> <li>3. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan Berbasis E-learning</li> <li>4. Workshop Persiapan Pelaksanaan E-learning</li> </ol>



- 2) Kajian kebijakan di bidang administrasi Negara yang terus dikembangkan dengan mengikuti isu-isu strategis di bidang administrasi Negara yang ada di daerah maupun nasional merupakan wadah bagi PKP2A IV LAN untuk menempatkan institusinya sebagai *reviewer* dan *recommender* bagi kebijakan publik yang berkaitan dengan ilmu administrasi Negara. Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan ini merupakan salah satu *leading sector* bagi PKP2A IV LAN untuk berkontribusi berbagai pemikiran strategis terhadap isu-isu yang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

Tabel 1.11  
Produk Kajian PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019

TAHUN	NAMA KAJIAN
2015	Kajian Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah
2016	Kajian Inovasi Pelayanan Publik di Daerah
2017	Kajian Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan
2018	Kajian Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN di Pemerintah Daerah
2019 (Pagu Anggaran)	1. Kajian Strategi Membangun Ketahanan Desa dalam Rangka Menuju Desa Mandiri 2. Kajian Akses Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Aceh

- 3) Keberadaan Jurnal Transformasi Administrasi (e-Jurnal) yang bertujuan memberikan layanan publikasi artikel hasil kajian empirik maupun konseptual dan sebagai media dalam mengawal perkembangan publikasi karya tulis ilmiah di bidang administrasi publik, diharapkan menjadi wadah rujukan dan rekomendasi bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) PKP2A IV LAN juga telah menjadi *trigger* bagi *stakeholders* lainnya di daerah terutama dalam pengembangan inovasi administrasi Negara. Hal ini telah diwujudkan oleh PKP2A IV LAN melalui proyek perubahan yang melekat pada kurikulum pembelajaran Layanan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II, III dan IV, dimana setiap peserta diklat diwajibkan menyusun proyek perubahan yang inovatif selama proses pembelajaran diklat dan dapat

mengimplementasikannya di instansi masing-masing dalam *milestone* jangka pendek dengan durasi minimal 2 bulan.

- 5) Adanya kebutuhan dari lembaga diklat di daerah terhadap mitra kerja yang strategis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, terutama dalam pengawasan dan pembinaan lembaga diklat secara periodik untuk diakreditasi.
- 6) Kondisi geografis PKP2A IV LAN yang wilayah kerjanya berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana daerah-daerah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan karena berbatasan langsung dengan luar negeri, dalam hal ini terdapat peluang besar dan menguntungkan bagi PKP2A IV LAN untuk berkoordinasi dengan daerah-daerah tersebut dalam melaksanakan kajian dibidang ekonomi perbatasan maupun kerja sama luar negeri. Selain itu, kondisi seperti ini juga menjadi pintu masuk bagi PKP2A IV LAN untuk berkoordinasi dengan stakeholders yang ada di Kepulauan Sumatera dalam mempersiapkan daerahnya masing-masing menghadapi persaingan global yakni dengan telah dibentuknya Masyarakat Ekonomi Asia (*Asian Economic Community*) pada tahun 2015 yang sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai salah satu pasar tunggal terbesar ke-3 di dunia.

## C.2 Tantangan

Dalam menghadapi berbagai regulasi, kebijakan, dan inovasi di bidang administrasi Negara, sebagai lembaga yang baru eksis selama  $\pm$  8 tahun, PKP2A IV LAN memiliki berbagai keterbatasan yang apabila diakumulasikan akan menjadi tantangan, diantaranya :

- 1) Belum adanya mekanisme pengukuran yang spesifik terhadap kemanfaatan hasil kajian yang telah dibukukan dan disebarluaskan ke berbagai instansi pemerintahan daerah maupun vertikal.
- 2) Kehadiran lembaga-lembaga diklat di daerah baik sebelum dan setelah didirikannya PKP2A IV LAN menjadi salah satu tantangan besar bagi PKP2A IV LAN di masa sekarang dan akan datang. Dengan adanya berbagai

lembaga diklat yang tersebar di Kepulauan Sumatera dengan tingkat kualifikasinya masing-masing, secara langsung menghadirkan semangat kompetitif tersendiri bagi para *stakeholder* dalam memilih instansi/lembaga diklat yang layak dan berkualitas untuk pengiriman calon peserta diklat.

- 3) Masih sulitnya mengintegrasikan dan mengakomodir kebijakan strategis daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMA maupun RPJMD dalam pemenuhan hasil kajian kebijakan sehingga dapat lebih bermanfaat dalam peningkatan tatanan birokrasi pemerintahan daerah dalam jangka waktu tertentu (*fixed term*) maupun secara berkesinambungan.
- 4) Keterbatasan kompetensi sumber daya aparatur pada PKP2A IV LAN terutama masih minimnya jumlah Widyaiswara dan Peneliti serta beberapa jabatan fungsional tertentu berdampak signifikan terhadap pengelolaan kegiatan dan anggaran. Sebagai contoh, ketergantungan terhadap widyaiswara eksternal untuk proses pembelajaran diklat terutama diklat kepemimpinan dan berbagai diklat prioritas nasional mengakibatkan pengeluaran biaya begitu besar apabila dibandingkan dengan pemanfaatan widyaiswara internal.
- 5) Belum adanya indikator khusus untuk memonitoring para alumni diklat yang diselenggarakan oleh PKP2A IV LAN, sehingga hal ini berakibat sulitnya mengukur tingkat keberhasilan (*feedback*) pengimplementasian output pembelajaran diklat, diantaranya proyek perubahan (inovasi) yang telah dihasilkan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi

Searah dengan visi Lembaga Administrasi Negara 2015-2019 yaitu: *“Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara”*. Visi ini akan menjadi pedoman bagi LAN dalam memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur Negara dan sistem administrasi Negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui:

1. Peningkatan kualitas kebijakan;
2. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
3. Pengembangan inovasi administrasi negara;
4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu administrasi yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen dalam merealisasikan terwujudnya visi LAN yang telah dirumuskan untuk masa lima tahun (2015-2019) dan untuk mensinergikan *business process* internal dan eksternal LAN di daerah dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, PKP2A IV LAN telah menetapkan visinya yaitu **“Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara di Daerah.”**

Untuk pencapaian visi bersama (*shared vision*) tersebut, PKP2A IV LAN yang berkedudukan di daerah senantiasa berupaya untuk berperan aktif, kooperatif dan inovatif dalam berbagai upaya diantaranya :

- a. mewujudkan pembaharuan sistem administrasi negara yang berkualitas di daerah dengan berupaya memaksimalkan kualitas dari hasil kajian kebijakan administrasi negara;
- b. mengambil peran sebagai penggagas (inisiator) guna menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem administrasi di daerah dengan berupaya meningkatkan kompetensi aparatur di daerah dengan memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara dan lembaga kediklatan;

- c. menjadi fasilitator yang selalu bersinergi dan bermitra dengan semua *stakeholders* daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas sistem administrasi Negara di daerah;
- d. mewujudkan peningkatan ketatalaksanaan serta kelembagaan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya inovasi bagi aparatur sipil negara;
- e. sebagai mediator dalam upaya mewujudkan sinergisitas antar semua elemen penyelenggara inovasi administrasi pemerintahan di daerah; dan
- f. bersama-sama LAN RI mewujudkan pengembangan ilmu administrasi negara yang nantinya dapat diterapkan di daerah.

Seiring dengan perumusan visi dan untuk mewujudkan komitmen dalam pencapaian visi secara transparan dan akuntabel, LAN juga menetapkan nilai-nilai rujukan yang harus dipahami dan dimiliki oleh seluruh pegawai LAN yaitu :

I N T E G R I T A S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi</li> <li>- Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial</li> <li>- Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan</li> <li>- Mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan</li> <li>- Menjunjung tinggi amanah</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensinya</li> <li>- Berorientasi pada kualitas hasil</li> <li>- Menjunjung tinggi kode etik profesi</li> <li>- Selalu melakukan pengembangan potensi diri</li> <li>- Bekerja secara total dan bertanggungjawab</li> <li>- Mampu mengambil keputusan secara mandiri maupun dalam tim</li> </ul>	P R O F E S I O N A L
---	---

**I  
N  
O  
V  
A  
T  
I  
F**

- Berfikir dan bertindak di luar kebiasaan (*Out of the Box*)
- Melakukan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah
- Melakukan pembenahan secara terus menerus (*Continuous Improvement*) terhadap proses dan metode kerja
- Mampu beradaptasi dengan perkembangan IT
- Berani mengambil resiko untuk sebuah keputusan

- Menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan gotong royong
- Bersikap adil
- Merasakan apa yang dirasakan orang lain/memahami orang lain
- Saling menguatkan antar sesama warga LAN
- Bersikap ramah, mengembangkan senyum salam sapa serta cepat tanggap terhadap persoalan orang lain
- Mau mendengar pendapat dan kritik orang lain

**P  
E  
D  
U  
L  
I**

## 2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah dirumuskan, maka disusun misi yang merupakan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan. Misi yang dirumuskan PKP2A IV LAN yaitu:

1. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi Negara;
2. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.

## 2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PKP2A IV LAN, maka ditetapkan beberapa tujuan yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan;
- b. Berkontribusi aktif dalam mewujudkan pengembangan inovasi;

- c. Melaksanakan administrasi pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang professional;
- d. Mewujudkan pejabat fungsional bidang kebijakan dan administrasi negara yang kompeten.

#### **2.4. Sasaran Strategis**

Dari penjabaran visi dan misi, maka dirumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang bertujuan untuk pencapaian target kinerja yang berbasis *output* dan *outcome*, sebagai berikut :

##### **a. Sasaran strategis 1**

Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan

Indikator kinerja utama

- 1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
- 2) Jumlah jurnal yang diterbitkan

##### **b. Sasaran strategis 2**

Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas

Indikator kinerja utama

- 1) Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan
- 2) Persentase persentase pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan

##### **c. Sasaran strategis 3**

Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas

Indikator kinerja utama

*Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation*

##### **d. Sasaran strategis 4**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik

Indikator kinerja utama

*Indeks tata kelola internal PKP2A IV LAN*

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Di era kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (periode RPJMN 2015-2019), terdapat 9 (sembilan) agenda pembangunan yang menjadi prioritas dimana agenda pembangunan tersebut mengarah kepada Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019) dan beberapa program tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi PKP2A IV LAN, diantaranya mencakup:

##### **1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui beberapa strategi yang ditempuh :

a. Mewujudkan kelembagaan pemerintah efektif, efisien, dan sinergis.

Strategi yang ditempuh diantaranya : penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementrian, LPNK, dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/horizontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

b. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan *merit-based*.

Strategi yang ditempuh diantaranya : penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penyempurnaan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi



birokrasi pada instansi pemerintah daerah; penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Strategi yang ditempuh diantaranya : penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi; memastikan implementasi kebijakan secara konsisten; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan Nasional; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.

d. Penerapan e-government untuk mendukung proses administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi.

Strategi yang ditempuh diantaranya : penguatan kebijakan *e-government*; penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM; penetapan quick wins penerapan e-government; pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur e-government oleh K/L/Pemda.

e. Penerapan open government, yang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah.

Strategi yang ditempuh diantaranya : peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi

Provinsi/Kabupaten/Kota; pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi badan publik daerah.

f. Penguatan manajemen kinerja.

Strategi yang ditempuh diantaranya : penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara; penguatan implementasi manajemen kinerja kementerian/lembaga, penguatan pengendalian kinerja pembangunan nasional yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan system pemberian penghargaan dan sanksi kinerja pembangunan; serta didukung penerapan e-government yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional.

g. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Strategi yang ditempuh diantaranya : peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.

## **2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Sasaran dari upaya strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan *press-release* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di-*publish* pada akhir tahun 2017, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia tahun 2017 berada pada peringkat ke-3 ASEAN dan ke-96 dunia (<https://www.transparency.org>). Oleh karena itu, perlu keterlibatan semua elemen (*bottom-up* maupun *top-down*) dalam merumuskan kebijakan anti-korupsi, meningkatkan *permitivitas* masyarakat terhadap korupsi dan bersama-sama memberantas korupsi yang sudah menjadi *patologi* sosial dan melemahkan integritas bangsa serta dapat menghambat tujuan pembangunan nasional.

Dalam hal ini, PKP2A IV LAN yang merupakan salah satu lembaga *think-tank* Pemerintah sudah saatnya melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya :

- a. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi;
- b. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi;
- c. Meningkatkan pencegahan korupsi melalui penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi;
- d. Bekerjasama dengan *stakeholders* terkait baik dari pemerintahan, pemerhati sosial maupun lembaga-lembaga swasta lainnya untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap korupsi melalui strategi pendidikan anti-korupsi mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara.

### **3. Pemantapan Politik Dalam Negeri**

Sasaran yang ingin dicapai dari pemantapan politik dalam negeri dalam skema RPJMN 2015-2019 adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis serta transparan pada tahun 2019 melalui pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan. Pemantapan politik dalam negeri ini merupakan salah satu prioritas nasional dimana dalam pengimplementasiannya dengan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan akuntabel.

Oleh karena itu, PKP2A IV LAN sebagai salah satu instansi vertikal dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi para pemimpin perubahan secara tidak langsung turut serta berpartisipasi mewujudkan iklim demokrasi yang transparan, adil dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya melalui *merit system* yang bertujuan untuk mengorbit calon aparatur sipil negara yang mampu memberikan pelayanan birokrasi secara profesional dan netral.

#### **4. Pemantapan Politik Luar Negeri**

Sasaran yang ingin dicapai dari pemantapan politik luar negeri adalah terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional (*bilateral, regional* dan *multi-lateral*) sehingga mampu merubah persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia dalam pengelolaan isu-isu strategis yang sedang berkembang. Dengan kondisi geografis berbatasan dengan Selat Malaka dan berada di wilayah *triangle-growth*, PKP2A IV LAN memiliki potensi untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan stabilitas politik luar negeri diantaranya dengan membangun jejaring (kemitraan) dengan negara-negara tetangga khususnya ASEAN melalui keikutsertaan dalam seminar maupun *workshop* internasional yang berkenaan dengan tata kelola birokrasi pemerintahan dan administrasi publik.

#### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LAN**

Secara garis besar arah kebijakan yang ditempuh oleh LAN di era globalisasi dalam mewujudkan semangat reformasi birokrasi (*good governance and clean government*) dan kebijakan pro-publik diantaranya adalah melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, kualitas kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi serta program-program prioritas nasional lainnya yang berkenaan dengan ilmu administrasi Negara. Untuk hal ini, diperlukan rumusan strategi yang merupakan penjabaran visi dan misi LAN dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi LAN dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi sekarang sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Kepala LAN nomor 4 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN Tahun 2018-2019, yaitu :

- a. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi pegawai ASN yang efektif;
- b. Terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas;
- c. Tersebarluaskannya inovasi administrasi negara;
- d. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi administrasi negara terapan yang berkualitas bagi pegawai negeri;
- e. Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di LAN RI.

### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PKP2A IV LAN

Dalam pencapaian visi 5 (lima) tahun sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam pembaharuan sistem administrasi negara dan pembinaan diklat aparatur negara, PKP2A IV LAN memiliki arah kebijakan yang pada prinsipnya melaksanakan beberapa rangkaian proses yang sudah terintegrasi secara sistematis dan komprehensif. Secara garis besar arah kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh PKP2A IV LAN merujuk pada arah kebijakan dan strategi LAN serta dapat menganulir beberapa prioritas sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam Perkaln nomor 4 tahun 2018 tentang Penetapan IKU LAN Tahun 2018-2019, diantaranya :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan kedeputian LAN dalam pelaksanaan proses kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara;
- b. Meningkatkan hubungan kemitraan (*partnerships*) dengan lembaga penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka menjaring isu-isu strategis lokal maupun nasional;
- c. Merumuskan dan mengintegrasikan tema kajian dengan isu-isu strategis daerah supaya dapat memberikan dampak signifikan dan berkelanjutan bagi para *stakeholders* atau pengambil kebijakan daerah;
- d. Meningkatkan proses *in-depth screening* terhadap hasil penulisan karya ilmiah oleh para penulis yang akan diajukan dan dimuat dalam Jurnal Transformasi Administrasi;
- e. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kompetensi pengajar (*widyaiswara*), bahan ajar (kurikulum diklat), dan layanan sarana prasarana;
- f. Menjalin kerjasama dengan lembaga diklat daerah untuk mensinergikan proses penyelenggaraan diklat dan menghindari *overlapping* pembagian tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing;
- g. Meningkatkan intensitas pembinaan diklat khususnya terhadap lembaga-lembaga diklat di daerah yang belum terakreditasi;
- h. Meningkatkan pendampingan dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi administrasi Negara di sektor publik;

- i. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur internal melalui program kediklatan, bimbingan teknis dan pendidikan gelar maupun non-gelar lainnya yang dilaksanakan secara klasikal dan non-klasikal;
- j. Mendorong perbaikan tata kelola internal melalui peningkatan perolehan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), persentase realisasi anggaran (RA), persentase GUP tepat waktu (UP), rata-rata konsistensi realisasi anggaran dengan rencana penarikan anggaran (DIPA), dan persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi (minimal 20 JP/tahun).

Tabel 3.1  
Skor SAKIP LAN dan PKP2A IV LAN Tahun 2015 - 2016

No	Instansi	2015			2016			2017		
		Nilai	Skor	Kategori	Nilai	Skor	Kategori	Nilai	Skor	Kategori
1	LAN	70,76	BB	Sangat Baik	70,27	BB	Sangat Baik	70,99	BB	Sangat Baik
2	PKP2A IV LAN	68,48	B	Baik	61,66	B	Baik	61,10	B	Baik

- k. Meningkatkan pencapaian kinerja menjadi lebih baik sesuai arahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu :
  - 1) Aspek implementasi; merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran, yang meliputi penyerapan anggaran (PA), konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan (K), pencapaian keluaran (PK), dan nilai efisiensi (NE);
  - 2) Aspek manfaat; merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai, meliputi pencapaian hasil (CH); dan
  - 3) Aspek konteks; merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan.

Adapun sasaran strategi yang ditetapkan berupa turunan dari strategi yang telah dirumuskan oleh LAN selaku induk organisasi, yaitu :

1. Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik
4. Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A IV LAN

Pendekatan arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu dengan menyelaraskan beberapa usulan kegiatan tahun anggaran 2019 pada bidang Kajian dan Kebijakan Inovasi Administrasi Negara, bidang Diklat Aparatur, dan bagian Administrasi yang merupakan supporting unit yang melekat di masing-masing kegiatan, diantaranya :

- 1) Bidang Kajian dan Kebijakan Inovasi Administrasi Negara
  - a. Pelaksanaan Kajian Kebijakan di Bidang Administrasi Negara berupa penyusunan 2 (dua) buku kajian, dengan tema :
    - Strategi membangun ketahanan desa dalam rangka menuju desa mandiri
    - Akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Aceh
  - b. Seminar Administrasi Negara yang mengangkat isu berkenaan dengan efektivitas dana desa dan kondisi lapangan kerja di Indonesia;
  - c. Penerbitan Jurnal di Bidang Administrasi Negara yang diterbitkan sebanyak 2 (dua) Edisi.
- 2) Bidang Diklat Aparatur
  - a. Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV dan Latsar (CPNS);
  - b. Pelatihan Revolusi Mental (Pelayanan Publik di Era Digital) sebanyak 4 (empat) kelas;
  - c. Pelatihan Teknis dan Fungsional (metode E-learning) yang akan diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kelas;

- d. Pengendalian Kualitas Diklat yang meliputi pembinaan (monitoring dan evaluasi) lembaga diklat di daerah dan penyelenggaraan rapat koordinasi kediklatan.
- 3) Bagian Administrasi
- a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
    - 1. Layanan Perencanaan, meliputi tahapan penyusunan pagu alokasi anggaran, rencana kerja tahunan dan penyusunan renstra 2020-2024;
    - 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi monev semester I dan II, penyusunan LKIP, perjanjian kinerja (IKU) dan laporan kinerja.
  - b. Sub bagian Keuangan
    - 1. Layanan Manajemen Keuangan berupa penyusunan laporan keuangan untuk semester I dan II.
  - c. Sub bagian Umum dan SDM
    - 1. Layanan Manajemen SDM, meliputi pengiriman pegawai mengikuti diklat dan bimbingan teknis;
    - 2. Layanan Manajemen BMN yang terdiri dari penatausahaan BMN dan sewa sarana prasarana;
    - 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi berupa pencetakan bahan publikasi;
    - 4. Layanan Umum, meliputi kegiatan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
    - 5. Layanan Perkantoran berupa pemenuhan belanja pegawai dan kebutuhan operasional perkantoran.

### **3.4. Kerangka Regulasi**

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis PKP2A IV LAN, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategi memuat kerangka regulasi yang dalam hal ini dapat diartikan kebijakan atau ketentuan mengikat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi



Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala LAN dan beberapa regulasi eksternal dan internal lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, kerangka regulasi juga merupakan instrumen untuk memecahkan berbagai permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan.

Merujuk pada Renstra LAN Tahun 2015-2019, ada beberapa legislasi level peraturan perundang-undangan beserta turunannya dan Peraturan Kepala LAN sebagai kebutuhan akan regulasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PKP2A IV LAN, diantaranya :

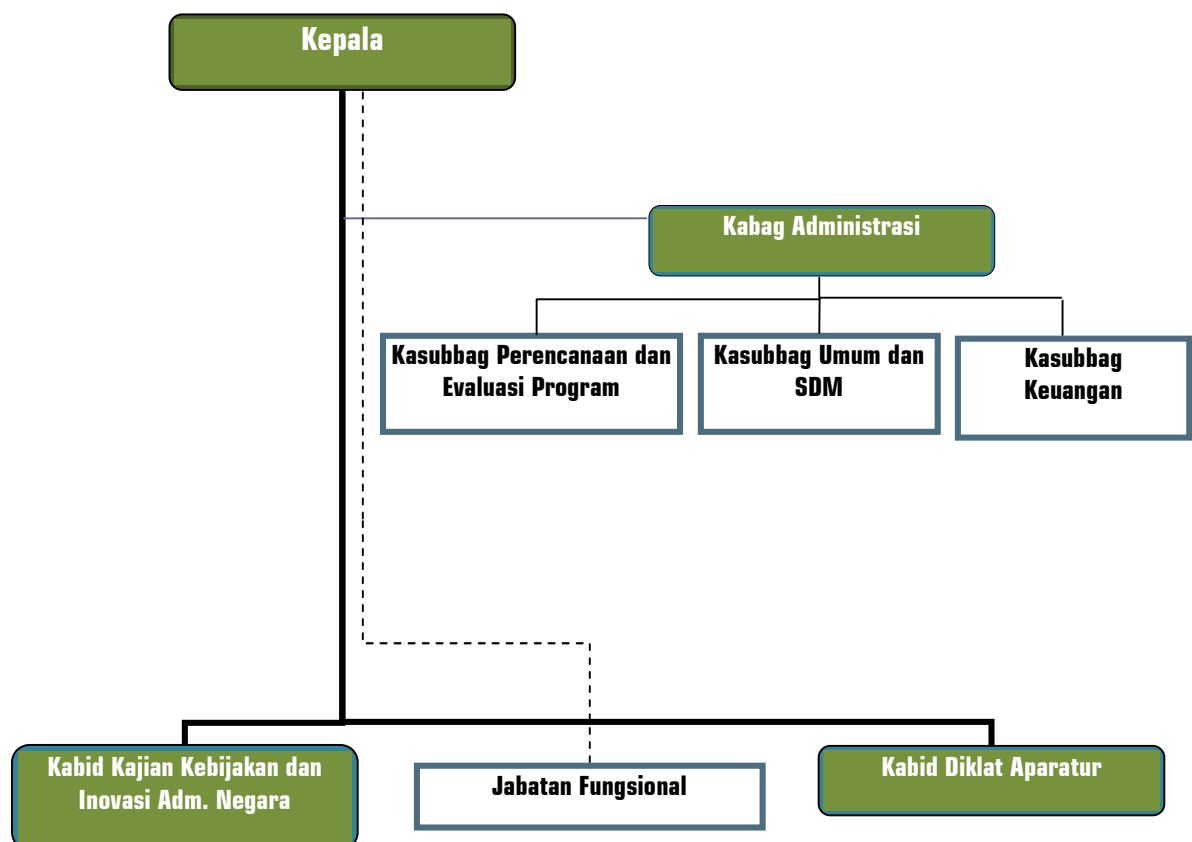
- 1) UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap manajemen sumber daya aparatur;
- 2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat mengarah pada regulasi Perkalan berupa hal-hal yang berkaitan dengan inovasi;
- 3) UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4) Perpres nomor 57 tahun 2013 tentang LAN;
- 5) Perkalan nomor 14 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LAN;
- 6) Perkalan nomor 4 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) LAN.

### **3.5. Kerangka Kelembagaan**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang LAN, disebutkan bahwa “LAN adalah lembaga non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)”. Peraturan Presiden inilah yang menjadi dasar perubahan struktur organisasi LAN yang men-*deliver* fungsi-fungsi yang menjadi kewajiban LAN dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, khususnya di bidang administrasi Negara.

Begitu juga halnya dengan PKP2A IV LAN yang merupakan salah satu unit Eselon II (Satker) dari LAN, dengan merujuk pada turunan Perpres tersebut dan dengan dikeluarkannya regulasi internal berupa Perkaln nomor 14 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LAN, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PKP2A IV LAN senantiasa berkoordinasi dengan jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) LAN beserta unit dan kedeputiannya masing-masing supaya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Diantara bentuk hubungan kelembagaan yang pernah dilaksanakan berupa penyelenggaraan program prioritas nasional seperti Laboratorium Inovasi, diklat Reforms Leader Academy (RLA) dan Revolusi Mental serta program-program prioritas institusional lainnya.

Gambar 3.1  
Struktur Organisasi PKP2A IV LAN



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan indikator yang menunjukkan tingkat sasaran kinerja yang lebih spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu dan ditetapkan setelah adanya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam hal ini target kinerja PKP2A IV LAN untuk tahun 2018-2019 mengacu pada Peraturan Kepala LAN nomor 4 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018-2019 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2018. Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan dan diintegrasikan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala LAN dan Kepala PKP2A IV LAN beserta turunannya memuat komitmen bersama untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan dialokasikan penganggarnya.

Dibandingkan dengan indikator kinerja sebelumnya, terdapat beberapa perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dimana dalam perumusannya lebih berfokus pada pencapaian *outcome*. Di satu sisi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKP2A IV LAN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memposisikan diri sebagai *recommender* bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan isu-isu strategis yang berkenaan dengan ilmu administrasi Negara serta konsistensinya dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara. Namun, disisi lain peningkatan kompetensi sumber daya internal perlu dipertimbangkan lebih baik, sehingga *market* yang telah digagas dapat tercapai sesuai yang diharapkan, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanat Kementerian PPN/Bappenas, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersifat indikatif, efektif, efisien, dan dapat diukur tingkat pemanfaatannya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, perbandingan target kinerja PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 yang memetakan sasaran strategis, indikator kinerja, program

dan kegiatan mengalami berbagai perubahan yang sangat dimungkinkan karena adanya perubahan kebijakan internal dan eksternal LAN.

Berdasarkan Perkaln nomor 4 tahun 2018, perumusan target kinerja PKP2A IV tahun 2018-2019 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama. Sedangkan tahun 2017 terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama, dan pada tahun 2016 dirumuskan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama. Sedangkan tahun 2015 dan 2016 masing-masing ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama yang ingin dicapai.

Tabel 4.1  
Target Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	1
		Jumlah jurnal yang diterbitkan	2
2	Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas	Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	92,86%
		Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	90,00%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik	Jumlah inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	30
4	Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A IV LAN	Indeks tata kelola internal PKP2A IV LAN	89,30

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, diantaranya sumber daya aparatur yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra K/L yang disusun dalam perspektif jangka menengah (2015-2019) merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas.

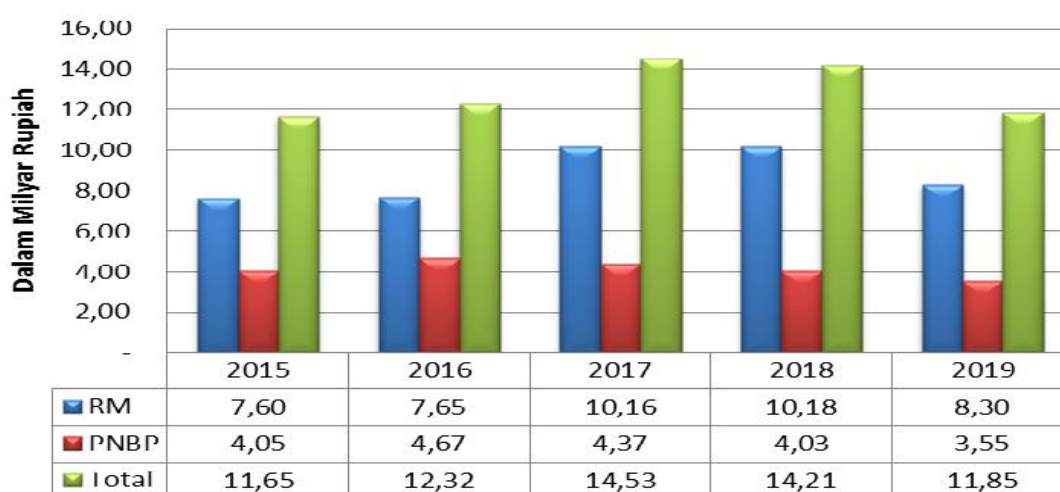
Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan *baseline* terhadap struktur program dan kegiatan baru dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi:

- a. Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan database kepegawaian;
- b. Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor; dan
- c. Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam penyusunan kerangka pendanaan, PKP2A IV LAN terlebih dahulu memperhatikan sumber perolehan dana dan target program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019 dengan memperhitungkan sasaran strategis yang hendak dicapai, jumlah output yang ditargetkan dan ketersediaan dana. Sejak tahun 2015, sumber pendanaan pada PKP2A IV LAN diperoleh dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan persentase rata-rata masing-masing sebesar 68% : 32%. Berdasarkan matriks kerangka pendanaan masing-masing Kementerian/ Lembaga yang tercantum dalam buku RPJMN Bappenas tahun 2015-2019, PKP2A IV LAN telah melakukan penyesuaian terhadap kerangka pendanaan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian terhadap aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang selanjutnya diubah menjadi aplikasi Kolaborasi

Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) serta penyesuaian pada indikator kinerja masing-masing kegiatan sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara perumusan kerangka pendanaan tahun 2015-2016 dan tahun 2017-2019.

Gambar 4.1  
Grafik Perbandingan Alokasi Anggaran RM dan PNBP  
Tahun 2015-2019 (berdasarkan DIPA Awal dan Pagu Anggaran)



Dilihat dari grafik diatas, skema pendanaan baik yang bersumber dari RM maupun PNBP dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Pola penganggaran yang masih bersifat *baseline*, dalam artian belum menampung kebijakan baru dan telah memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro, *accress* (kenaikan alamiah) misal untuk belanja pegawai dan tunjangan kinerja.
- b. Pengalokasian anggaran dengan memperhatikan kinerja penyerapan tahun sebelumnya, pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan usulan anggaran tahun berikutnya.
- c. Kebijakan fiskal pemerintah yang belum stabil yang dipengaruhi oleh pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan.
- d. Besarnya pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor prioritas dan strategis lainnya pemerintah seperti infrastruktur, kebijakan dana desa, kelistrikan dan energi terbarukan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

## 1. Kerangka Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2015-2016

Tabel 4.2  
Kerangka Pendanaan Tahun 2015-2016

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	2015		PROGRAM DAN KEGIATAN	2016	
		Target	Pendanaan (ribuan rupiah)		Target	Pendanaan (ribuan rupiah)
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN</b>					
	a. Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan	1 paket	100.548	a. Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan	1 dokumen	103.559
	b. Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian	1 laporan	57.773	b. Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian	2 laporan	69.123
	c. Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan	1 paket	12.403	c. Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan	2 dokumen	55.736
	d. Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/ perpustakaan	1 paket	17.950	d. Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan	1 dokumen	25.727
	d. Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan	5 paket	120.760	d. Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan	6 dokumen	97.225
	e. Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi	1 paket	37.700	e. Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi	1 dokumen	37.890
	g. Layanan Perkantoran	12 Bln Layanan	4.682.163	f. Rakor/Raker PKP2A IV LAN	1 laporan	5.685
				g. Layanan Perkantoran	12 Bln Layanan	5.622.611
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN</b>					
	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN	1 paket	2.070.101	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN	1 paket	935.457

<b>3</b>	<b>Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara</b>					
	a. Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/ buku di bidang administrasi negara	1 paket	122.814	a. Rekomendasi Kebijakan Administrasi Negara di PKP2A IV	1 dokumen	148.403
	b. Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara	1 laporan	52.006	b. Layanan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV, Prajabatan Golongan I, II dan III	12 penyelenggaraan	5.762.778
	c. Penyelenggaraan bimtek/ lokakarya/ seminar/ sosialisasi/ rapat koordinasi kediklatan	8 laporan	4.138.296	c. Layanan Pembinaan Diklat	2 dokumen	148.588
	d. Pembinaan Widyaiswara	3 laporan	62.835	d. Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional	3 penyelenggaraan	110.177
	e. Penyusunan Jurnal/ Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara	2 paket	77.800	e. Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara	2 jurnal	58.424
	f. Penyelenggaraan Rakor/ Raker Kajian	1 laporan	47.328	f. Rakor/Raker Kajian di PKP2A IV LAN	1 dokumen	36.896
	g. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	1 laporan	102.250			
	<b>TOTAL</b>		<b>11.702.727</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.218.279</b>



## 2. Kerangka Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2017-2019

Tabel 4.3  
Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	2017		2018		2019	
		Target	Pendanaan (ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (ribuan rupiah)
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN</b>						
	a. Layanan Internal ( <i>overhead</i> )	-	-	1 layanan	1.500.000	-	-
	b. Layanan Perencanaan	1 layanan	38.102	1 layanan	53.400	1 layanan	53.688
	c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 layanan	45.855	2 layanan	58.600	2 layanan	35.812
	d. Layanan Manajemen SDM	1 layanan	151.230	1 layanan	365.000	1 layanan	250.000
	e. Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan	84.960	1 layanan	109.000	1 layanan	87.200
	f. Layanan Manajemen BMN	2 layanan	373.205	2 layanan	199.334	2 layanan	256.424
	g. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1 layanan	34.040	1 layanan	61.541	1 layanan	49.300
	h. Layanan Umum	1 layanan	16.450	2 layanan	22.615	2 layanan	20.248
	i. Layanan Perkantoran	12 bulan	7.075.339	12 bulan	5.450.604	12 bulan	6.905.288
	<b>Sub total I</b>		<b>7.819.181</b>		<b>7.820.094</b>		<b>7.657.960</b>
<b>2</b>	<b>Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara</b>						
	a. Layanan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS	4 kegiatan	3.735.631	4 kegiatan	3.299.445	4 kegiatan	3.299.445
	b. Layanan Pelatihan Revolusi Mental/ Diklat Pelayanan Publik di Era Digital	100 peserta	200.000	125 peserta	500.000	100 peserta	200.000
	c. Layanan Pelatihan <i>Reform Leader Academy</i>	25 peserta	1.238.000	25 peserta	1.400.000	-	-
	d. Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional/ Diklat E-learning	4 kegiatan	265.370	2 layanan	535.500	6 layanan	294.000
	e. Pembinaan Pelatihan dan Kewidyaiswaraan	-	-	2 dokumen	260.000	2 dokumen	110.000
	f. Rekomendasi hasil kebijakan Administrasi Negara di PKP2A IV LAN	2 dokumen	140.762	1 rekomendasi	80.000	3 dokumen	230.000

	g. Jurnal/Majalah di bidang kajian administrasi negara di PKP2A IV LAN	2 dokumen	63.228	2 dokumen	60.000	2 dokumen	60.000
	h. Advokasi/Perkonsultasian/Fasilitasi di Bidang Administrasi Negara	1 dokumen	70.000	-	-	-	-
	i. Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-	1 daerah	255.000	-	-
	<b>Sub total II</b>		<b>5.712.991</b>		<b>6.389.945</b>		<b>4.193.445</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>13.532.172</b>		<b>14.210.039</b>		<b>11.851.405</b>

## BAB V PENUTUP

Review Renstra PKP2A IV LAN tahun 2018 untuk masa transisi tahun 2019 bertujuan memberikan pemahaman tentang kerangka kerja dan aspek kinerja yang telah dan akan diwujudkan dalam masa 5 (lima) tahun sesuai periode renstra (2015-2019). Dalam review renstra ini dilampirkan juga dokumen kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah disesuaikan dengan berbagai kebijakan internal dan eksternal terhadap sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran.

Selain itu, review renstra yang merupakan agenda tahunan juga bertujuan untuk menciptakan optimisme pencapaian kinerja organisasi selama 5 (lima) tahun, dengan harapan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi PKP2A IV LAN tetapi juga bagi *stakeholders* internal maupun eksternal yang menjadi mitra kerja PKP2A IV LAN untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berbasis pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya review renstra ini, diharapkan dapat membantu pengelola kegiatan pada PKP2A IV LAN dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan renstra periode akan datang (2020-2024).

Lampiran I  
Matriks Kinerja dan Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019  
Kementerian/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara  
(Berdasarkan dokumen RPJMN 2015-2019 Bappenas)

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	LOKA SI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019		
086	06	3600	PROGRAM PENGAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA							44,112		
			Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur PKP2A IV LAN							44,112	NAD	
				Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara dan pembinaan analis kebijakan	Jumlah Rekomendasi kebijakan administrasi negara yang didiseminasikan	1 <i>policy paper/ policy brief</i>	2 <i>policy paper/ policy brief</i>	2 <i>policy paper/ policy brief</i>	2 <i>policy paper/ policy brief</i>	2 <i>policy paper/ policy brief</i>	2,23	
				Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah Laporan Advokasi di Bidang Administrasi Negara		1 <i>Laporan</i>	1 <i>Laporan</i>	1 <i>Laporan</i>	1 <i>Laporan</i>	0,39	
					Jumlah Jurnal/ Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara	2 <i>Edisi</i>	2 <i>Edisi</i>	2 <i>Edisi</i>	2 <i>Edisi</i>	2 <i>Edisi</i>	0,44	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor/ Raker Kajian	1 <i>Penyeleng- garaan</i>	1 <i>Penyeleng- garaan</i>	1 <i>Penyeleng- garaan</i>	1 <i>Penyeleng- garaan</i>	1 <i>Penyeleng- garaan</i>	0,23	
				Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat	Jumlah Laporan Pembinaan Diklat		4 <i>Laporan</i>	4 <i>Laporan</i>	4 <i>Laporan</i>	4 <i>Laporan</i>	5,22	
					Jumlah Peserta Bimtek Kediklatan dan sejenisnya						0,08	

					Jumlah Alumni diklat kepemimpinan dengan predikat memuaskan		<i>Peserta</i>	<i>Peserta</i>	<i>Peserta</i>	<i>Peserta</i>	16,40	
					Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional yang meningkat pengetahuannya		<i>Peserta</i>	<i>Peserta</i>	<i>Peserta</i>	<i>Peserta</i>	0,55	
					Jumlah Peserta Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi		<i>300 peserta</i>	<i>300 peserta</i>	<i>300 peserta</i>	<i>300 peserta</i>	7,16	
<b>086</b>	<b>02</b>	<b>3591</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN</b>	<b>Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana</b>							<b>3,52</b>	
			<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN</b>								<b>3,52</b>	<b>Aceh - Banda Aceh</b>
					Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>				<b>3,52</b>	
<b>086</b>	<b>01</b>	<b>3583</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga</b>								
			<b>Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN</b>									
					Jumlah Laporan di Bidang akuntansi/ laporan keuangan	<i>1 Paket</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	0,56	
					Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	0,59	

				Jumlah Dokumen/ Pedoman/ Laporan di Bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan	<i>1 Paket</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>0,12</i>	
				Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/ Perpustakaan	<i>1 Paket</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>0,12</i>	
				Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan/ program, penganggaran dan pengendalian	<i>6 Paket</i>	<i>6 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>0,70</i>	
				Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan, Hubungan Kelembagaan	<i>1 Paket</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>0,21</i>	
				Jumlah Bulan Terlaksananya pelayanan umum kerumahtanggaan dan perlengkapan	<i>12 Bulan Layanan</i>	<i>12 Bulan Layanan</i>	<i>12 Bulan Layanan</i>	<i>12 Bulan Layanan</i>	<i>12 Bulan Layanan</i>	<i>-</i>	

Lampiran II  
Matriks Kinerja dan Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2015-2016  
Kementerian/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara  
(Berdasarkan DIPA Awal)

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (Rp Miliar)		TOTAL ALOKASI 2015-2016 (Rp Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2015	2016		
086	06	3600	PROGRAM PENGAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA					7,75	10,38	18,13	
			Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur PKP2A IV LAN	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	1 policy paper/ policy brief	1 policy paper/ policy brief	0,12	0,15	0,27	
				Pengembangan ilmu administrasi negara	Jumlah karya tulis ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah nasional/ internasional	2 Edisi	2 Jurnal	0,08	0,06	0,14	
				Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan	95%	85%	3,44	4,15	7,59	
					Jumlah Badan Diklat yang dibina	0 (tidak dilaksanakan/ efisiensi anggaran)	4	0	0,10	0,10	
					Indeks kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat	Baik	Baik	4,05	5,76	9,81	
					Jumlah Widyaiswara yang dikembangkan kompetensinya	40 (efisiensi anggaran)	114	0,06	0,16	0,22	
					Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah inovasi administrasi negara	0 (tidak dilaksanakan)	-	0	0	0

086	02	3591	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana				2,07	0,94	3,01	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN					2,07	0,94	3,01	
					Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Paket	1 Paket	2,07	0,94	3,01	
086	01	3583	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga				5,03	6,02	11,05	
			Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN					5,03	6,02	11,05	
					Jumlah Laporan di Bidang akuntansi/laporan keuangan	1 Paket	1 Dokumen	0,10	0,10	0,2	
					Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	0,06	0,07	0,13	
					Jumlah Dokumen/ Pedoman/ Laporan di Bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan	1 Paket	2 Dokumen	0,01	0,06	0,07	
					Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/ Perpustakaan	1 Paket	1 Dokumen	0,02	0,03	0,05	
					Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan/ program, penganggaran dan pengendalian	5 Paket	6 Dokumen	0,12	0,10	0,22	
					Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan, Hubungan Kelembagaan	1 Paket	1 Dokumen	0,04	0,04	0,08	
					Rakor/Raker	-	1 Laporan	-	0,01	0,01	
					Jumlah Bulan Terlaksananya pelayanan umum kerumahtanggaan dan perlengkapan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	4,68	5,62	10,30	



**Matriks Kinerja dan Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2017**  
**Kementerian/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara**  
**(Berdasarkan DIPA Awal)**

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ALOKASI (Rp Miliar)	TOTAL ALOKASI 2017 (Rp Miliar)	LOKASI	
KL	PROG	KEG				2017	2017			
086	06	3600	PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA				5,71	5,71		
			Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur PKP2A IV LAN	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik.	1	0,14			
					Jumlah policy brief/policy note yang didiseminasikan kepada stakeholders.	1				
					Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pasca pelatihan.	75%	3,74		
						Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan.	80%	0,27		
					Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil co-creation.	100	-		
				Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara.	1	0,07			
					Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara.	Memuaskan				

086	01	3583	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN</b>	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A IV yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A IV LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A IV LAN.	<i>Baik</i>	<b>7,82</b>	<b>7,82</b>	
			<b>Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN</b>		Jumlah Layanan di Bidang Internal ( <i>Overhead</i> )	-	-		
				Jumlah Layanan di Bidang Perencanaan	98% (1 Layanan)	0,04			
				Jumlah Layanan di Bidang Pemantauan dan Evaluasi	98% (2 Layanan)	0,05			
				Jumlah Layanan di Bidang Manajemen SDM	98% (1 Layanan)	0,15			
				Jumlah Layanan di Bidang Manajemen Keuangan	98% (1 Layanan)	0,08			
				Jumlah Layanan di Bidang Manajemen BMN	98% (2 Layanan)	0,37			
				Jumlah Layanan di Bidang Humas dan Komunikasi	98% (1 Layanan)	0,03			
				Jumlah Layanan di Bidang Umum	98% (1 Layanan)	0,02			
				Jumlah Layanan di Bidang Perkantoran	98% (12 Bulan)	7,08			

**Matriks Kinerja dan Pendanaan PKP2A IV LAN Tahun 2018-2019**  
**Kementerian/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara**  
**(Berdasarkan DIPA Awal dan Usulan Pagu Anggaran)**

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (Rp Miliar)		TOTAL ALOKASI 2017-2018 (Rp Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2018	2019	2018	2019		
086	06	3600	PROGRAM PENKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA					6,39	4,19	10,58	
			Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur PKP2A IV LAN	Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	1	2	0,08	0,15		
					Jumlah jurnal yang diterbitkan	2	2				
				Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas	Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	92,86%		2,98	2,98		
					Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	90%		0,54	0,41		
				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik	Jumlah inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	30	-	0,26	-		
086	01	3583	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN	Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A IV LAN	Indeks tata kelola internal PKP2A IV LAN	Baik		7,82	7,66	15,48	
			Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN		Jumlah Layanan di Bidang Internal ( <i>Overhead</i> )	98% (1 Layanan)	-	1,50	-		
					Jumlah Layanan di Bidang Perencanaan	98% (1 Layanan)	98% (1 Layanan)	0,05	0,05		
					Jumlah Layanan di Bidang Pemantauan dan Evaluasi	98% (2 Layanan)	98% (2 Layanan)	0,06	0,03		

				Jumlah Layanan di Bidang Manajemen SDM	98% (1 Layanan)	98% (1 Layanan)	0,49	0,25		
				Jumlah Layanan di Bidang Manajemen Keuangan	98% (1 Layanan)	98% (1 Layanan)	0,10	0,08		
				Jumlah Layanan di Bidang Manajemen BMN	98% (2 Layanan)	98% (2 Layanan)	0,20	0,26		
				Jumlah Layanan di Bidang Humas dan Komunikasi	98% (1 Layanan)	98% (1 Layanan)	0,06	0,05		
				Jumlah Layanan di Bidang Umum	98% (1 Layanan)	98% (2 Layanan)	0,01	0,02		
				Jumlah Layanan di Bidang Perkantoran	98% (12 Bulan)	98% (12 Bulan)	5,54	6,90		